

CHAPTER I  
INTRODUKSI  
PENDULUM *THE SICK MAN*

**S**EJAK kekhalfahan Usmaniah runtuh, Turki seperti seorang pemuda yang jatuh bangun, tergopoh-gopoh mencari jati dirinya. Ideologi dan garis-politik sekuler yang dijalankan pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal, tidak saja mengubah sistem politik dan pemerintahan rakyat Turki. Namun lebih dari itu, kebijakan sekuleristik ekstrim yang dijalankan secara drastis dan radikal turut mencabut akar identitas rakyat Turki dan menempatkan mereka pada sebuah arena kultur, sosio-politik, dan peradaban yang sama sekali berbeda: Barat<sup>1</sup>.

Secara geo-kultural, Turki memang merupakan negara yang berada di antara dua benua dan dua peradaban: Asia dan Eropa serta Timur dan Barat. Dengan luas wilayah sekitar 814.578 km<sup>2</sup>. 97% wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya berada

di benua Eropa. Di selatan, Turki berbatasan dengan Irak sepanjang 378 km dan 877 km dengan Siria. Di barat, perbatasan dengan Yunani sepanjang 203 km dan 269 km dengan Bulgaria. Di sebelah timur, sepanjang 529 km dengan Iran, 276 km dengan Georgia, 312 km dengan Armenia, dan 18 km dengan Azerbaizan. Turki dikelilingi oleh tiga lautan, yakni, laut Mediterania di selatan, Laut Egean di Barat, dan Laut Hitam di sebelah Utara.

Letak geografis ini menjadikan posisi Turki sangat strategis yaitu sebagai "jembatan" antara Timur dan Barat. Turki menjadi jembatan" sosio-kultural dan sosio-ekonomi serta merupakan penghubung antara dua peradaban yang memiliki sejarah perang serta pertarungan kepentingan yang sangat panjang dan dalam. Faktor geografis-historis ini pula yang hingga sekarang seringkali menimbulkan perdebatan baik pada tataran internal pemerintah Turki maupun kaitannya dengan dunia Internasional, terutama hubungannya dengan Uni Eropa.

Turki modern mulai menunjukkan ambisinya untuk mendekatkan diri dengan dunia Barat pasca revolusi 1924. Ambisi ini tidak hadir begitu saja. Ambisi ini lahir sebagai antitesa dari kondisi Turki pra-1924 yang oleh orang Eropa Turki digelar *The Sick Man* (Orang Sekarat). Kondisi kekhalifahan pada waktu itu memang sedang dalam titik nadir yang penuh dengan kekalahan, penyelewengan dan korupsi. Di titik deklinasi itulah, Mustafa Kemal melakukan

serangkaian kudeta dan “pembaharuan”. Secara resmi pada tahun 1922 melalui Majelis Nasional Turki, kekhalifahan dihapus. Mustafa Kemal berhasil membawa Turki pada apa yang disebutnya sebagai “*contemporary civilization*”.<sup>2</sup>

Pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk ini, Turki menerapkan sistem satu partai yang otoriter dan diktator. Paham sekularisme dan nasionalisme ditetapkan sebagai ideologi “resmi” dan garis politik Turki pada masa itu. Bahkan mulai tahun 1930-an, sekularisme dan nasionalisme yang dijalankan pemerintah Mustafa Kemal bermakna sangat ekstrem dan radikal, di mana sekularisme diinterpretasikan bukan saja sebagai pemisahan hukum negara dan agama, tetapi juga sebagai penyingkiran semua yang berbau agama (Islam) dari ranah-ranah publik dan tegaknya pengawasan negara atas institusi-institusi keagamaan yang masih tersisa.

Revolusi secara besar-besaran dilakukan oleh Mustafa Kemal pada tiga bidang utama yaitu pemerintahan, pendidikan dan hukum. Kebijakan radikal ini dapat dilihat dengan dihapuskannya ketentuan yang menyatakan Islam sebagai agama resmi Turki dalam konstitusi pada tahun 1928. Perubahan di bidang sosio-kultural terlihat pada pemberlakuan numerasi internasional dan alfabet latin (menggantikan abjad Arab) pada tahun 1928, mengadopsi kode komersial baru (1929), hak voting dan elektoral bagi perempuan dalam pemilu lokal

(1930) dan kemudian dalam pemilu parlemen (1934), mengganti bahasa negara menjadi bahasa Turki pada tahun 1932, melarang pemakaian kostum-kostum keagamaan di luar tempat ibadah (1934), mengadopsi nama akhir (1935), dan memindahkan ibukota negara dari Istanbul ke Ankara. Dari sini semakin jelas terlihat bahwa sekularisme Turki merupakan cara lain untuk memutuskan jalinan masyarakat Turki dengan tradisi-tradisi Islam pasca-Usmani dan Timur Tengah serta lebih mereorientasikan masyarakat Turki ke kebudayaan Barat.<sup>3</sup>

Tahun-tahun awal berdirinya Turki modern itu juga merupakan periode dimana dunia sedang terlibat pada kondisi yang sangat tidak stabil dan penuh ancaman perang. Berada pada kondisi dunia yang sedang tidak stabil tersebut memaksa Turki berupaya keras untuk mengembangkan potensi militernya. Turki yang sebagian besar wilayahnya berada di kawasan Eropa cenderung mengarahkan kekuatan militernya pada aliansi militer negara-negara Eropa. Hal ini terlihat jelas pada Perang Dunia II saat Turki bergabung dalam Aliansi Blok Barat bersama Amerika Serikat dan sekutunya.

Kemudian dengan bantuan dari negara-negara Eropa, terutama Inggris dan Perancis, Turki sukses mengembangkan kekuatan militernya dengan sangat pesat.<sup>4</sup> Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi adanya kekuasaan militer yang sangat dominan dan kuat di Turki. Militer mempunyai peran dan

kemampuan yang besar untuk mengendalikan jalannya pemerintahan selama beberapa dekade. Militer pun kemudian menjadi "*guard*" di garis terdepan pelestari ideologi sekuler yang dikumandangkan Mustafa Kemal.

Dalam konteks sejarah ini, pendulum kebijakan luar negeri Turki kian diarahkan ke Barat. Semakin mengarah pada upaya-upaya untuk meingitegrasikan Turki ke dalam wilayah Eropa secara kultural, politik-ekonomi, dan geografis. Dalam perjalanannya kemudian, hubungan erat dengan Amerika Serikat dan orientasinya ke negara-negara demokratis Eropa tetap merupakan fokus utama kebijakan luar negeri Turki dalam setiap era pemerintahan. Turki kemudian bergabung dalam Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan ikut mengintegrasikan diri dalam Perserikatan Dagang Eropa. Kebijakan luar negeri pemerintahan Turki pada masa-masa itu bertujuan untuk meningkatkan nilai strategis Turki di mata Aliansi Barat. Selain agar Turki dapat memperoleh bantuan militer dan ekonomi dari negara-negara Barat.<sup>5</sup> Hingga akhir 1990-an masih terlihat jelas bahwa politik luar negeri Turki dikonsentrasikan secara penuh pada negara-negara Barat dalam hal ini Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa.

Kebijakan luar negeri yang terfokus pada Barat tersebut juga turut "memaksa" Turki untuk berupaya agar dapat bergabung dengan organisasi supranasional yang mengayomi negara-negara Eropa. Terkait usahanya untuk bergabung dengan Uni Eropa,

Turki telah mengajukan permohonan untuk menjadi salah satu anggota Uni Eropa yang pertama kali ditandatangani pada 14 April 1987, dan telah menjadi mitra AS sejak 1963. Turki menandatangani perjanjian kerjasama dengan Uni Eropa pada tahun 1995 dan secara resmi direkomendasikan sebagai calon anggota penuh Uni Eropa pada 12 Desember 1999. Negosiasi pertama dilakukan pada Oktober 2005 dan masih dalam proses hingga saat ini.<sup>6</sup> Dengan proses selama itu, ironisnya, hingga saat ini status keanggotaan Turki di Uni Eropa belum mendapat kejelasan meskipun Turki telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi persyaratan keanggotaan Uni Eropa.

Sementara itu, dalam eskalasi politik domestik Turki terkini, telah terjadi perubahan aliran politik dominan yang cukup kontras. Perubahan rezim dan kepemimpinan ini tentunya membawa perubahan yang signifikan dalam politik luar negeri Turki. Berkuasanya Partai Keadilan dan Pembangunan (***Adalet ve Kalkınma Partisi*** disingkat **AKP**) memberikan corak baru dalam pemerintahan Turki. Partai ini beraliran konservatif-demokrat dengan pembangunan dan peningkatan ekonomi serta penegakan demokrasi sebagai agenda utama. Selain itu adanya nuansa Islam dalam pandangan dan program-program kepartaian partai ini menjadikannya sorotan terutama oleh kubu sekuler Turki. Sejak awal pendiriannya, AKP dilihat sebagai suatu ancaman bagi ideologi sekuler walaupun disisi lain diakui sebagai

cikal bakal kemajuan ekonomi dan politik Turki baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

AKP didirikan oleh Recep Tayyib Erdogan pada tahun 2001 dan langsung mendapat sambutan baik dari mayoritas rakyat Turki. AKP berhasil membawa Erdogan pada puncak kekuasaan setelah memenangkan 46,58% suara pada pemilihan umum tanggal 22 Juli 2007.<sup>7</sup> Berkuasanya Erdogan menjadikan Turki sebagai topik hangat dalam perpolitikan internasional. Kebijakan Erdogan dianggap mengalami pergeseran dari pemerintahan sebelumnya, di mana nuansa Islami ingin dikembalikan ke dalam masyarakat Turki dan kebijakan luar negeri yang tidak lagi hanya berpusat dan terfokus pada Barat semata.

Walaupun Turki pada masa Perdana Menteri Recep Tayyib Erdogan secara resmi mengatakan bahwa Turki akan tetap berjuang dengan keras untuk masuk Uni Eropa. Namun dalam praktek kebijakan luar negerinya nampak bahwa Turki telah mengalami "pergeseran" yang signifikan dalam hubungannya dengan integrasi Turki dalam tubuh Uni Eropa. Pembangunan kerjasama dengan negara-negara Islam dan negara-negara Asia menjadi sorotan dunia internasional. Selain itu, adanya perubahan model kepemimpinan yang dibawa oleh Erdogan juga banyak menarik perhatian negara-negara di dunia. Erdogan secara tegas dan terang-terangan untuk mengeluarkan kritik

dan kecaman bahkan bagi negara-negara Barat yang selama ini dikenal sebagai “inang” bagi Turki.

Misalnya pada *World Economic Forum* di Davos, Inggris tahun 2009, Erdogan secara tegas menentang Presiden Israel, Shimon Peres, dan mengancam invasinya terhadap Palestina. Dalam kesempatan lain, Erdogan mengancam keras serangan Israel atas kapal pembawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, Mavi Marmara.<sup>8</sup> Pemerintahan Erdogan juga menunjukkan keberaniannya menjalin kerja sama trilateral dengan Iran dan Brasil, untuk pengayaan uranium.<sup>9</sup>

Erdogan juga menyatakan dukungannya secara penuh terhadap pengembangan nuklir di Iran dan mengkritik kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan sanksi terhadap Iran. Isu-isu ini memperlihatkan bahwa telah terjadi perubahan sikap Turki dalam memandang dan menanggapi isu-isu baik regional maupun internasional, khususnya terkait dengan sikap dan kebijakannya pada negara-negara Barat. Turki dibawah pemerintahan Erdogan (dengan partai AKP sebagai gerbong politiknya) mencoba menyeimbangkan pendulum kebijakannya agar tidak “*taqlid* buta” atau tunduk secara buta pada kemauan dan tindakan negara-negara Barat. Dalam sebuah laporan *Die Presse*, Koran harian Australia memaparkan bahwa Turki saat ini telah mencari alternatif lain seperti Rusia dan Iran sebagai pengganti Uni Eropa dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap Barat.<sup>10</sup> Turki seolah mendapat “identitas”



barunya dengan pendulum yang tak lagi selalu mengayun ke negara-negara Barat.

Disinilah letak ketertarikan menyangkut isu ini. Apalagi jika kita melihat fakta bahwa terdapat banyak distorsi-distorsi baik internal maupun eksternal yang terjadi dalam perpolitikan Turki kontemporer dan hubungannya dengan Uni Eropa. Apa yang dilakukan oleh Turki di masa Erdogan ini akan sangat mempengaruhi kawasan baik Asia maupun Eropa serta dunia internasional pada umumnya. Lalu apakah yang melatarbelakangi perubahan-perubahan sikap dalam kebijakan luar negeri Turki? Seberapa besar pengaruh Erdogan sebagai pemimpin Turki memiliki andil dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan luar negerinya? Apakah Turki masih punya harapan terkait proses aksesinya dengan Uni Eropa? Ataukah Turki akan meninggalkan Uni Eropa? Atau sebaliknya, Uni Eropa-lah yang meninggalkan Turki?

Pertanyaan-pertanyaan besar tersebut akan kita kaji dengan mengfokuskan pada analisa tentang pergeseran atau reorientasi kebijakan luar negeri Turki. Analisis kondisi-kondisi internal maupun eksternal, ketokohan, dan analisis faktor-faktor determinan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri akan penulis angkat untuk menjawab "keanehan-keanehan" dalam praktik hubungan Turki dan Uni Eropa pada masa pemerintahan Recep Tayyib Erdogan. Buku ini akan menjadi jawaban atas tanda tanya kita tentang lahirnya sebuah kekuatan baru

dunia yang secara geo-strategis memiliki perang besar dalam menentukan "nasib" pertemuan Timur dan Barat.